

KINERJA KEPALA DESA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN di KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

Guruh Candra Nugraha/074254235

(the_calypso93@yahoo.com)

Abstrak

Implementasi dari peraturan pemerintah daerah tentang pemerintahan desa telah menunjukkan kepala desa khususnya di Kecamatan Menganti memiliki latar belakang atau tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Serta yang tidak dapat dibantah pula, kepala desa di Kecamatan Menganti menghasilkan kinerja yang beragam dalam menjalankan pemerintahan di desanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Kinerja Kepala Desa menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kinerja Kepala Desa menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik cluster random sampling sebanyak 100 responden (aparatur desa dan masyarakat). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan angket campur. Sedangkan analisis datanya menggunakan rumus persentase.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kepala desa yang berpendidikan SMP, kepala desa yang berpendidikan SMU dan kepala desa yang berpendidikan sarjana.

Kata Kunci : pengukuran kinerja.

Abstract

Implementation of government regulations on village government has shown a particular headman in Desa Menganti have the background or education level different. The head of the village in Desa Menganti produced a mixed performance in running the government in his village. Based on the background mentioned above, the authors formulate the problem as follows: "How the Headman Performance based on its Education at Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik".

This study aims to describe the performance level According to Headman's Education of Desa Menganti, Gresik. This research was conducted in Desa Menganti, Kabupaten Gresik, East Java Province.

This study use descriptive quantitative with cluster random sampling of 100 respondents (village officials and the public). Then, Data collection techniques is using closed and open questionnaire.

While data analysis using the percentage formula. According to education level, the research results show that the headman's performance is a highly significant difference between the headman junior high school education, high school-educated and Graduate educated.

Keywords: performance appraisal.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sampai saat ini masih banyak pihak yang berbicara tentang pemerintahan yang baik seperti pada negara berkembang yang sedang berupaya keras melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berbagai pandangan dan pendapat banyak dilontarkan guna menciptakan pemerintahan yang baik. Upaya tersebut bukan hal yang mudah dilaksanakan seperti halnya membangun suatu menara fisik atau gedung misalnya, yang bisa diperkirakan secara pasti bahan - bahannya dan waktu selesainya gedung tersebut. Pembangunan pemerintahan tidak bisa dibangun

semudah dan secepat seperti pembangunan gedung tersebut. Hal ini dikarenakan, pemerintahan merupakan salah satu sistem sosial dengan berbagai kompleksitas elemennya, juga merupakan salah satu sub sistem dari suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem kehidupan bangsa dan negara.

Pendidikan bukan merupa kan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia . Pendidikan diperlukan oleh semua orang, bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan itu dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali, orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang sudah

menjadi rutinitas, Karena itu benarlah kalau dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan sepatutnya selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, merefleksikannya di tengah-tengah tindakan/aksi dalam dunia yang digelutinya. Pendidikan merupakan perkara penting untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup manusia. Ia menjadi asas dalam membina ilmu pengetahuan dalam membentuk diri dan masyarakat yang lebih dinamik serta terdidik dari sudut jasmani dan rohani. Pendidikan merupakan sebahagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa seperti Desa, negara kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah tersebut.

Berlakunya Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi : “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.

Dan pada pasal 6 berbunyi.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah memerlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang “good governance” akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Memasuki era reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan arah pembangunan yang bertumpu pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintah sebagai

kunci pokok tercapainya cita – cita bangsa yang merdeka dan berkembang. Upaya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas harus dimulai pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, dalam hal ini dimulai pada tingkat pemerintahan di desa dengan asumsi bahwa tingginya kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung dari kualitas sumber daya manusianya.

Kepala Desa yang merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan performa yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila aparat pemerintah pada tingkat desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam menyelenggaraan pemerintahan, maka akan berpengaruh pada kinerja pemerintah pada tingkat Kabupaten, Propinsi hingga Pusat.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa.

Kecamatan Menganti memiliki berbagai macam karakter dan kebudayaan yang dimiliki oleh masing – masing desa. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya desa yang dimiliki oleh Kecamatan Menganti yang terdiri dari 22 desa.

Dari beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Menganti, lebih dari separuh desa di Kecamatan Menganti berstatus daerah perkotaan yaitu sebanyak 13 desa. Status daerah perkotaan memiliki makna bahwa didaerah tersebut cukup mudah terjangkau, memiliki lahan pertanian yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah yang lain, sebagian besar penduduk bekerja tidak sebagai petani, dan tersedianya banyak sarana dan prasarana kebutuhan sehari-hari. Kecamatan Menganti merupakan kecamatan yang Desa yang berstatus perkotaan tersebut adalah Sidojangkung, Mojotengah, Bringkang, Domas, Boteng, Kepatihan, Hendrosari, Putat Lor, Menganti, Hulaan, Laban, Gempolkurung, dan Sidowungu.

Status pemerintahan semua desa di Kecamatan Menganti adalah desa, status ini memiliki arti bahwa semua desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri salah satunya adalah pemilihan kepala desa melalui pemilihan secara langsung. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dapat disimpulkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai wewenang :

1. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
5. Mengajukan rancangan peraturan desa. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
7. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Bila ini dapat terlaksana dengan baik, maka tugas dan kewajiban yang lainnya sudah dapat terlaksana dengan baik pula. Sebab dalam pemerintahan telah mencakup dan mengatur semua bidang, baik bidang sosial kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang politik dan keamanan maupun bidang hukum. Berarti untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, maka kepala desa dituntut untuk menguasai bidang ilmu pemerintahan.

Sedangkan menurut Perda nomor 5 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, pasal 14 (persyaratan bakal calon kepala desa) pada huruf "c" menyatakan "berpendidikan paling rendah tamat SMA dan atau sederajat." Ilmu pemerintahan yang dipelajari di bangku SMA atau sederajat ada pada mata pelajaran PPKn yang pembahasannya baru pada tahap dasarnya saja. Lebih lanjut secara spesifik ilmu pemerintahan dibahas banyak pada mata kuliah di perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu sosial dan ilmu politik.

Implementasi dari Perda diatas pada kenyataannya telah menunjukkan kepala desa khususnya di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memiliki latar belakang atau tingkat pendidikan yang berbeda - beda, mulai dari yang berpendidikan akhir SMA atau sederajat sampai yang berpendidikan akhir Sarjana. Dalam hal ini pendidikan tidak dapat terelakkan dari pengaruh kinerja kepala desa sehingga memberikan implementasi kepada kepala desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menghasilkan kinerja yang beragam dalam menjalankan pemerintahan di desanya.

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, pasal 14 menyatakan bahwa "Setiap warga masyarakat berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan pasal 14 peraturan daerah ini."

Sehingga orang yang menjadi kepala desa adalah yang telah dipercayakan oleh warga sebagai pemimpin

dan pemegang kendali pemerintahan desa itu. Warga yang memilih Kepala Desa memiliki dasar dan berbagai alasan yang berbeda-beda, misalnya ada yang memilih menurut kharisma, pengaruh, tingkat pendidikan, status sosial, kekayaan, kepentingan, hubungan keluarga dan lain sebagainya. Figur kepala desa dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat, pola pikir, kepentingan, dan karakteristik mereka secara umum.

Menurut buku "Kecamatan Menganti dalam angka 2012" Berdasarkan pendataan potensi desa 2011, tingkat pendidikan kepala desa di Kecamatan Menganti sebagian besar SMA yaitu sekitar 68,18%, kepala desa yang berpendidikan Sarjana sekitar 27,27% dan sisanya yaitu 4,54% memiliki tingkat pendidikan SMP.

Dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki oleh kepala desa Kecamatan Menganti cukup baik dalam menjalankan sistem pemerintahan yang berada di desa, sehingga mampu menjalankan pemerintahan yang berada di desa dengan kinerja yang berbeda. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh kepala desa/pimpinan merupakan satu hal yang sangat berperan penting dalam melakukan suatu kepemimpinan, untuk selalu siap mengantisipasi setiap perubahan yang akan muncul, karena perubahan merupakan sesuatu yang abadi.

Para pakar pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Andrias (2000) bahwa pembelajaran akan mampu membuat manusia tumbuh dan berkembang sehingga kemampuan, menjadi dewasa dan mandiri. Dengan seseorang memiliki pendidikan maka manusia/orang tersebut akan mengalami tranformasi diri, dari belum/tidak mampu menjadi mampu atau dari ketergantungan menjadi mandiri.

Pendidikan merupakan perkara penting untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup manusia. Pendidikan menjadi asas dalam membina ilmu pengetahuan dalam membentuk diri dan masyarakat yang lebih dinamik serta terdidik dari sudut jasmani dan rohani. Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Mengembangkan selalu berkembang dalam berbagai sektor pembangunan lainnya bukan saja karena sektor itu lebih dilihat sebagai sektor konsumtif, juga karena pendidikan adalah penjaga keadaan masyarakat itu sendiri yang digunakan sebagai dasar mencari pekerjaan.

Pemberdayaan aparat pemerintahan di desa adalah menjadi tanggung jawab pemimpinnya, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan besar untuk membina aparat desa agar memiliki kinerja yang lebih baik, akan tetapi hal ini tidak bisa terlaksana tanpa didahului oleh upaya peningkatan kinerja pemimpinnya (Kepala Desa). Menurut Hasibuan (2001 : 34) pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan pada kurun waktu tertentu.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa yang optimal, perlu mendasarkan pada pendekatan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan mendapat bantuan dan bimbingan dari Pemerintah.

Dalam hal ini diperlukan adanya sosok pemimpin yang baik dari kepala desa yang dapat menggerakkan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan perubahan yang diinginkan. Begitu pentingnya peranan kepala desa selaku pemimpin formal di desa untuk mendorong dan menggerakkan aktivitas ke arah tujuan yang diinginkan. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Mashuri Maschab bahwa “tingkat kemampuan aparat pelaksana akan mempengaruhi jadwal penyelenggaraan program, karena mempengaruhi kelancaran pelaksanaan dan kesempurnaan pencapaian sasaran (Mashuri Maschab : 1983).”

Oleh karena itu faktor kemampuan kepala desa selaku aparat pelaksana dan merupakan pemimpin formal di desa mempunyai peranan yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa yang memadai tersebut, akan memudahkan kepala desa yang bersangkutan di dalam mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Peranan kepala desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya pemerintahan itu berjalan secara baik dan lancar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut : Bagaimana kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut : Untuk menjelaskan kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penerbit Balai Pustaka, Jakarta Tahun 2003, Kinerja diartikan sebagai berikut : (1) Sesuatu yang dicapai/dihasilkan. (2) Prestasi yang diperlihatkan. (3) Kemampuan untuk bekerja. Darma (1990:11) mengemukakan bahwa Kinerja atau prestasi kerja adalah suatu yang dikerjakan atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau kelompok orang. Kinerja tersebut dapat diukur atau dinilai pada manusia pekerja atau keadaan suatu organisasi. Untuk

mengukur keefektifan kinerja dari manusia sukar, karena manusia merupakan makhluk yang selalu berubah dan penuh keterbatasan. Oleh karena itu, prestasi yang ditunjukkan sekarang ini akan berbeda dengan prestasi yang dicapai pada masa yang akan datang. Dengan demikian keefektifan manusia dalam hal ini kepala desa akan berubah dari waktu ke waktu.

Kinerja telah populer digunakan dalam mass-media dan media massa Indonesia memberi padanan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja tersebut, yakni “performance”. Menurut The scribner-Bantam English Dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada, tahun 1979, terdapat keterangan sebagai berikut : Pertama, berasal dari akar kata “to perform” yang mempunyai “entries” berikut : melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban sesuatu nazar, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa entries tersebut “to perform” adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan hasil seperti yang diharapkan, sedangkan arti kata performance merupakan kata benda (noun) dimana salah satunya adalah : “thing done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arti performance atau kinerja adalah sebagai berikut : “performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999:2). Kemudian mengenai kinerja (performance) diartikan pula oleh Simamora (1995:327) yaitu merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Suprihanto (2000:7) menyebutkan istilah kinerja dan prestasi kerja yaitu : hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran. Menurut Mangkunegara (2001:67), istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Jadi dengan demikian kinerja (performance) adalah suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Bagi

Lembaga atau Pemerintahan Desa, Kinerja dimaksud adalah hasil kerja Kepala Desa beserta perangkatnya yang dicapai dalam suatu periode tertentu.

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”*. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa yang merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Kata “jenjang” dimaknai sebagai susunan dan urutan dari sesuatu yang dilalui atau berupa pengalaman yang telah menghasilkan sebuah proses. Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan dengan pengalaman yang telah menghasilkan sebuah proses tersebut adalah pendidikan yang merupakan urutan dari bentuk - bentuk pengalaman seseorang dalam upayanya untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahuinya atau ingin mengetahuinya lebih mendalam lagi. Kata “jenjang ” pada kata “pendidikan” menunjukkan adanya proses yang berlangsung semakin mendalam dan berkelanjutan ini berlangsung pada proses belajar mengajar yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah sistem untuk belajar secara umum.

Pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan prosedur yang sistematis yang terorganisir baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Menurut Zainun (1996:73) pendidikan pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM sebelum memasuki pasar kerja. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Pendidikan mempunyai fungsi sebagai penggerak sekaligus pemacu terhadap potensi kemampuan SDM dalam meningkatkan prestasi kerjanya (Irianto, 2001:75), ia juga mengatakan bahwa nilai kompetensi seorang pekerja dapat dipupuk melalui program pendidikan, pengembangan dan pelatihan.

Menurut Siagian (1999:181-182), pertanyaan yang harus dihadapi oleh organisasi bukan lagi apakah akan melakukan investasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki, melainkan berapa besar investasi yang harus dibuat. Dari pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan bagi organisasi yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat. Para pegawai yang sudah berpengalamanpun selalu memerlukan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, karena selalu

ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan, pengembangan dan pembentukan tenaga kerja dapat dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan dan latihan (Hamalik, 2000:10). Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian (Notoatmojo, 1998:25).

Pendidikan berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sehingga cara penekanannya pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan prosedur yang sistematis dan terorganisir baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Menurut Irianto (2001:75) dalam pengembangan SM (human resource development) bahwa nilai-nilai kompetensi seseorang pekerja dapat dipupuk melalui program pendidikan, pengembangan atau pelatihan yang berorientasi pada tuntutan kerja aktual dengan penekanan pada pengembangan skill, knowledge dan ability yang secara signifikan akan dapat memberi standar perilaku dalam sistem dan proses kerja yang diterapkan.

Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari (Sedarmayanti, 2001:32). Menurut instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, “pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani, yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sedangkan pengertian pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional disebut bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang” (diskutip oleh Sedarmayanti).

Di dalam pembangunan yang berencana dan bertahap dengan harapan terjadinya pertumbuhan yang baik dan stabil, maka perencanaan pendidikan dan perencanaan kinerja mempunyai peranan yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Kinerja sebagai obyek dan juga subyek pembangunan perlu diperhatikan karena kinerja merupakan penggerak utama dari pembangunan. Aspek kinerja seperti pendidikan dan pembinaan

kemampuannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Adanya suatu perencanaan kinerja adalah untuk mencegah terjadinya penghamburan dana dan daya serta meningkatkan produksi dan produktivitas seoptimal mungkin. Hal ini diutamakan untuk mencapai tingkat pengelolaan jabatan setinggi-tingginya.

Pendidikan sekolah yang bersifat umum, pada dasarnya hanya mengakibatkan penguasaan pengetahuan tertentu, yang tidak dikaitkan dengan jabatan atau tugas tertentu. Dengan menempuh tingkat pendidikan tertentu menyebabkan seorang pekerja memiliki pengetahuan tertentu. Orang dengan kemampuan dasar apabila mendapatkan kesempatan pelatihan dan motivasi yang tepat, akan lebih mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikian jelas bahwa pendidikan akan mempengaruhi kinerja kepala desa. Pola pendidikan memberikan kemampuan kepada individu untuk : (1) Menyesuaikan dan menyederhanakan situasi yang kompleks. (2) Menganalisa masalah untuk menentukan penyebab yang kritis dalam unit kerja. (3) Memilih tindakan terbaik untuk memecahkan masalah. (4) Mengantisipasi masalah-masalah sehingga mereka dapat mencegah terjadinya masalah berikutnya.

Kecepatan dan kecermatan perlu selalu diperhatikan, ditingkatkan dan dipelihara oleh para kepala desa yang ada di kecamatan menganti, sehingga dari kombinasi tersebut dapat selalu berfungsi untuk terus memperbaiki kinerja kepala desa agar semakin baik. Maka yang diuntungkan dari hal itu adalah kepala desa itu sendiri, masyarakat dan pemerintahan pusat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah faktor untuk membangun kinerja kepala desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Waktu penelitian ini berlangsung yaitu mulai dari proposal sampai penyelesaian penyusunan skripsi.

Penelitian dimulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pelaksanaan Pengambilan Data, (3) Analisis Data, (4) Tahap Pembuatan Laporan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala desa dan masyarakat desa Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster random sampling* yang dimana hanya diambil sebagian populasi. Sehingga mendapatkan sampel 5 desa yang berjumlah 100 responden. Peneliti mengambil 5 desa tersebut dengan kriteria sebagai berikut : (1) Pendidikan kepala desa yang berbeda. (2) Padatnya jumlah penduduk. (3) Mudah nya

sarana transportasi dan berkembangnya prasarana desa. (4) Dekat dengan Kecamatan Menganti yang sebagai pusat informasi.

Dalam menentukan besarnya sampel penelitian, menurut Slovin (Husein 1998:78) untuk menentukan sampel yang representatif di gunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir. Dalam penelitian ini e adalah 10%.

Untuk teknik pengumpulan data menggunakan dalam penelitian ini menggunakan : (1) angket campuran, (2) dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	∑ Angket
Kinerja Kepala Desa Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.	1 – 5
	b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat..	6 – 9
	c. Melaksanakan kehidupan demokrasi.	10 – 12
	d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.	13 – 17
	e. Melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.	18 – 20

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Data yang telah diperoleh dari hasil angket akan menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya yaitu dipersentasekan dan dideskripsikan secara keseluruhan terhadap jawaban dari angket atau responden. Dalam perhitungan berupa persentase tersebut, maka kriteria yang digunakan adalah seperti yang tercantum pada tabel ini :

Tabel 2
Skoring Option Item Angket

Jawaban	Skor
A (Sangat Setuju)	4
B (Setuju)	3
C (Kurang Setuju)	2
D (Tidak Setuju)	1

Setelah menentukan skor atas jawaban dari angket responden, maka digunakan penentuan kriteria penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 3
Kriteria Akhir Jawaban Responden

Range	Kriteria
20 – 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61 – 80	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN KIERJA KEPALA DESA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN di KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

1. Deskripsi karakter responden

Berdasarkan survei di lapangan peneliti mendeskripsikan responden yang dijumpai di lapangan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4
Responden Berdasarkan Pendidikan

SMP	SMU	Perguruan Tinggi	Σ
10	46	44	100

Berdasarkan tabel diatas masyarakat Kecamatan Menganti memiliki pendidikan yang baik karena responden yang terbanyak berjumlah 46 responden yang berpendidikan SMU sederajat, dan 44 responden berpendidikan perguruan tinggi. Pendidikan SMP sederajat memiliki jumlah responden yang sedikit yaitu hanya 10 responden. Hal ini merupakan bahwa pendidikan di Kecamatan Menganti merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kedudukan seseorang.

Tabel 5
Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pemerintahan	Swasta	Tidak Bekerja	Σ
45	38	17	100

Berdasarkan tabel diatas responden yang berjumlah 45 responden memiliki pekerjaan di pemerintahan seperti aparatur desa, guru, lembaga – lembaga desa dan yang bekerja pada pusat pemerintahan, sedangkan di sektor swasta terdapat 38 responden yang terdapat di Kecamatan Menganti yang terdiri dari pengusaha, petani, pedagang dan pekerja/karyawan. Dan 17 responden tidak bekerja yang diantaranya yaitu ibu rumah tangga dan belum bekerja. Sehingga dapat disimpulkan di Kecamatan Menganti terdapat responden yang masyarakatnya memiliki pekerjaan yang cukup bervariasi dalam hal pekerjaan.

2. Kinerja kepala desa tentang meningkatkan kesejahteraan rakyat

Kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan, yang membahas tentang meningkatkan kesejahteraan rakyat disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari hasil pengolahan angket. Data dari hasil angket responden, yang dibagi menjadi lima indikator dimana masing - masing indikator mewakili kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan SMP, SMU, Sarjana, yang akan dideskripsikan sesuai dengan indikator instrumen penelitian pada bagian bab III. Berdasarkan dari indikator tersebut, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil tentang Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat

Jenjang Pendidikan Kepala Desa	%	kriteria
SMP	77,2	Tinggi
SMU	73,8	Tinggi
Sarjana	74,1	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tentang kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan jawaban responden secara keseluruhan, kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 77,2% yang termasuk kedalam

kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 73,8% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 74,1% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMP mendapatkan hasil persentase tertinggi yaitu sebanyak 77,2%, sedangkan penilaian hasil persentase yang rendah terdapat pada kepala desa yang berpendidikan SMU yang mendapatkan hasil persentase sebanyak 73,8%.

Hal ini membuktikan bahwa kinerja kepala desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memiliki kinerja yang baik yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing – masing desa, sehingga kepala desa mendapatkan penilaian yang baik oleh masyarakat meskipun kinerja kepala desanya berbeda – beda. Dalam upaya ini kinerja yang diberikan kepala desa sudah baik sehingga masyarakat sudah merasakan upaya kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang biasanya dilihat dari taraf ekonomi masyarakat, dan banyaknya pembangunan di desa baik dari sarana dan prasarana dan adanya bantuan kepala desa terhadap rakyat miskin dan yatim piatu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat masuk pada kriteria tinggi baik yang berpendidikan SMP, SMU, bahkan Sarjana. Kepala desa diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan pendidikannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa dengan cepat dan tanggap sehingga dapat menjalankan program – program desa maupun pemerintah pusat dengan baik, sehingga kepala desa dapat memberikan kinerja yang maksimal jika ditunjang dengan pendidikan yang tinggi, dan dengan pendidikan yang tinggi otomatis dapat mempengaruhi pola pikir kepala desa dalam memecahkan suatu masalah serta dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kinerja kepala desa tentang memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan, yang membahas tentang memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari hasil pengolahan angket. Data dari hasil angket responden, yang dibagi menjadi lima indikator dimana masing-masing indikator mewakili kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan SMP, SMU,

Sarjana, yang akan dideskripsikan sesuai dengan indikator instrumen penelitian pada bagian bab III. Berdasarkan dari indikator tersebut, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil tentang Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jenjang Pendidikan Kepala Desa	%	kriteria
SMP	78,9	Tinggi
SMU	77,2	Tinggi
Sarjana	75,1	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tentang kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan jawaban responden secara keseluruhan, kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 78,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 77,2% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 75,1% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMP mendapatkan hasil persentase tertinggi yaitu sebanyak 78,9%, sedangkan penilaian hasil persentase yang rendah terdapat pada kepala desa yang berpendidikan Sarjana yang mendapatkan hasil persentase sebanyak 75,1%.

Hal ini membuktikan bahwa Kepala desa yang ditunjuk oleh rakyat, diharapkan mampu untuk memimpin desa dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Namun setiap kepala desa meskipun jenjang pendidikannya berbeda, kepala desa memiliki program – program yang dapat menarik perhatian masyarakat di dalam segala bidang yang dibutuhkan oleh rakyat.

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan yang paling bawah sehingga bersentuhan langsung kepada masyarakat, dan kepala desa di ibaratkan sebagai bapak dalam rumah tangga di pemerintahan desa sehingga memiliki kewajiban untuk meningkatkan semua bidang yang mengacu pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini metode atau program boleh beda namun harus menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberikan keamanan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga meskipun

berbeda – beda jenjang pendidikan kepala desa ataupun program – programnya mampu untuk memberikan kinerja yang baik terhadap masyarakatnya dalam segala bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga memberikan gambaran bahwa perbedaan pendidikan, program ataupun metode. Kepala desa dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Kinerja kepala desa tentang melaksanakan kehidupan demokrasi

Kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan, yang membahas tentang melaksanakan kehidupan demokrasi disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari hasil pengolahan angket. Data dari hasil angket responden, yang dibagi menjadi lima indikator dimana masing-masing indikator mewakili kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan SMP, SMU, Sarjana, yang akan dideskripsikan sesuai dengan indikator instrumen penelitian pada bagian bab III. Berdasarkan dari indikator tersebut, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil tentang Melaksanakan Kehidupan Demokrasi

Jenjang Pendidikan Kepala Desa	%	kriteria
SMP	76,6	Tinggi
SMU	76,1	Tinggi
Sarjana	75,7	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tentang kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan dalam upaya melaksanakan kehidupan demokrasi, sesuai dengan jawaban responden secara keseluruhan, kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 76,6% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 76,1% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 75,7% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMP mendapatkan hasil persentase tertinggi yaitu sebanyak 76,6%, sedangkan penilaian hasil persentase yang rendah terdapat pada kepala desa yang berpendidikan Sarjana yang mendapatkan hasil persentase sebanyak 75,7%.

Hal ini di deskripsikan bahwa meskipun negara Indonesia negara demokrasi yang dimana sebuah

pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih kepala desa merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, sehingga masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya secara langsung. Demokrasi juga menyebabkan setiap keputusan yang diambil kepala desa yang menyangkut kepentingan masyarakat maka keputusan tersebut selalu dirundingkan dengan wakil rakyat ataupun lembaga – lembaga yang ada di desa misalnya seperti BPD, RT dan RW untuk mencapai mufakat bersama.

Dalam proses demokrasi yang baik terjadi hubungan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan, sehingga kepala desa mengetahui keinginan rakyat yang bertujuan untuk membangun desa yang lebih baik. Dalam hal ini kepala desa yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat memaksimalkan kinerja kepala desa, mengakibatkan masyarakat bisa merasakan perbedaan kepala desa yang memiliki pendidikan yang rendah dan tinggi. karena dengan pendidikan yang tinggi akan dapat meningkatkan SDM seseorang, dalam hal ini kepala desa, mampu untuk meningkatkan pelayanannya terhadap publik secara maksimal, namun adapula pengalaman kepala desa yang dapat menunjang kinerja kepala desa agar lebih maksimal.

5. Kinerja kepala desa tentang menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik

Kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan, yang membahas tentang menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari hasil pengolahan angket. Data dari hasil angket responden, yang dibagi menjadi lima indikator dimana masing - masing indikator mewakili kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan SMP, SMU, Sarjana, yang akan dideskripsikan sesuai dengan indikator instrumen penelitian pada bagian bab III. Berdasarkan dari indikator tersebut, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil tentang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan yang Baik

Jenjang Pendidikan Kepala Desa	%	kriteria
SMP	79,9	Tinggi
SMU	71,4	Tinggi
Sarjana	78,9	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tentang kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan dalam upaya menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, sesuai dengan jawaban responden secara keseluruhan, kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 77,5% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 74,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 79,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan Sarjana mendapatkan hasil persentase tertinggi yaitu sebanyak 79,9%, sedangkan penilaian hasil persentase yang rendah terdapat pada kepala desa yang berpendidikan SMU yang mendapatkan hasil persentase sebanyak 74,9%.

Hal ini menunjukkan administrasi desa yang baik, karena dengan administrasi yang baik masyarakat dapat terbantu dengan kemudahan kepengurusan surat – menyurat yang berhubungan dengan administrasi desa. Kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan sumber dayanya sebagai kepala desa, karena jika kepala desa memiliki sumber daya dan pengetahuan yang tinggi dapat mengatasi masalah yang ada di desa dalam bidang administrasi. Semakin tinggi SDM kepala desa maka akan semakin sadar akan pentingnya administrasi pemerintahan yang baik, dan karena dengan SDM yang memadai, maka administrasi pemerintahan yang baik pada pemerintahan desa bisa terwujud secara maksimal, sehingga membuat administrasi menjadi tolak ukur dari keberhasilan kepala desa dalam memimpin suatu desa.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan penerapan prinsip – prinsip *good governance* yang masih lemah seperti masih terbatasnya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasinya. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan administrasi desa yang baik, karena dengan SDM kepala desa yang tinggi mampu untuk menciptakan administrasi yang baik. Administrasi yang baik memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk membantu penilaian kinerja kepala desa dan aparaturinya. Semakin masyarakat memberikan penilaian yang baik maka semakin baik pula kinerja kepala desa dan aparaturinya. Dalam hal ini kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dapat memahami keinginan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang maksimal.

6. Kinerja kepala desa tentang melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN

Kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan, yang membahas tentang melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari hasil pengolahan angket. Data dari hasil angket responden, yang dibagi menjadi lima indikator dimana masing-masing indikator mewakili kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan SMP, SMU, Sarjana, yang akan dideskripsikan sesuai dengan indikator instrumen penelitian pada bagian bab III. Berdasarkan dari indikator tersebut, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil tentang Melaksanakan Tata Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas dari KKN

Jenjang Pendidikan Kepala Desa	%	kriteria
SMP	77,2	Tinggi
SMU	73,8	Tinggi
Sarjana	74,1	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tentang kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan dalam upaya melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, sesuai dengan jawaban responden secara keseluruhan, kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 79,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 71,4% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 78,9% yang termasuk kedalam kriteria

tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMP mendapatkan hasil persentase tertinggi yaitu sebanyak 79,9%, sedangkan penilaian hasil persentase yang rendah terdapat pada kepala desa yang berpendidikan SMU yang mendapatkan hasil persentase sebanyak 71,4%.

Dalam indikator ini kepala desa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersih dari praktek KKN. Praktek KKN tidak mementingkan pendidikan yang berperan dalam pencegahan praktek KKN namun moral dan iman kepala desa yang dapat menjauhkan pemerintahan di desa dan masyarakatnya jauh dari praktek KKN. Pendidikan kepala desa tidak menjamin kepala desa tersebut tidak melakukan praktek KKN, namun dalam hal ini yang digunakan untuk menjauhkan kepala desa dari praktek KKN adalah moral seorang kepala desa yang diutamakan, karena jika kepala desa memiliki moral yang baik maka pemerintahannya jauh dari praktek KKN namun jika moral kepala desa tersebut tidak baik maka kepala desa tersebut akan menjadikan praktek KKN sebagai budaya yang menyenangkan namun memberikan kesengsaraan masyarakatnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ini pendidikan tidak mendapatkan peran penting dalam pola pikir kepala desa tersebut, iman dan moral kepala desa yang mengendalikan pola pikir kepala desa tersebut, sehingga diharapkan kinerja kepala desa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersih dari praktek KKN, dalam hal ini kepala desa sehingga kepala desa bisa memberikan contoh kepada bawahannya dan masyarakat untuk tidak melakukan praktek KKN. Karena praktek KKN dapat merugikan masyarakat bahkan Negara, karena dengan contoh yang baik dari kepala desa untuk menjauhi praktek KKN, setidaknya – tidaknya dapat ditiru oleh bawahannya dan masyarakatnya, dan kepala desa berhak untuk memberikan pemerintahan yang transparan di dalam rumah tangga desanya, karena praktek KKN sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dengan hal ini diharapkan pemerintahan di desa jauh dari praktek KKN.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data di atas, didapat berbagai temuan yang ada dalam penelitian ini yaitu kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan mendapatkan hasil yang berbeda dilihat dari perolehan persentase antara kepala desa yang berpendidikan SMP, SMU, dan Sarjana tetapi memiliki kriteria yang sama yaitu masuk dalam kriteria tinggi.

Kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan perolehan persentase tertinggi dari beberapa indikator, hal ini disebabkan oleh seringnya kepala desa tersebut mengikuti berbagai pelatihan ataupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya dan bersaing dengan kepala desa yang berpendidikan Sarjana, sehingga dalam beberapa indikator kepala desa yang berpendidikan SMP lebih unggul daripada dengan kepala desa yang berpendidikan SMU maupun kepala desa yang berpendidikan Sarjana.

Dalam pembahasan mengenai indikator meningkatkan kesejahteraan rakyat kepala desa yang berpendidikan SMP mendapatkan jumlah persentase sebanyak 77,2% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 73,8% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 74,1% yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

Sehingga dapat dilihat pada penyajian data bahwa kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dengan memiliki pengalaman dan pelatihan yang dapat membantu kepala desa untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa, dan meningkatkan pendidikan kepala desa dengan tujuan kinerja kepala desa dapat meningkat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara misalnya dengan memberikan bantuan dana kepada yang ingin meningkatkan mutu SDM baik dalam implementasi pendidikan maupun pelatihan.

Hal ini apa yang harus dihadapi dan dijawab oleh organisasi bukanlah apakah akan melakukan investasi bagi pengembangan SDM yang dimiliki acuan atau rangsangan kerja yang tinggi. Pemberian Reward misalnya berupa kenaikan upah atau gaji, insentif atau sejenis lainnya yang bisa mendatangkan hasrat kerja yang tinggi bagi karyawan. Khususnya bagi para kepala desa yang ada di Kecamatan Menganti yang dalam hal ini merupakan wewenang Bupati setempat.

Kemudian pada indikator memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 78,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 77,2% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 75,1% yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

Kepala desa yang berpendidikan tinggi mengutamakan kemajuan desa dalam bentuk pembangunan desa yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, dengan pendidikan yang dimiliki oleh masing – masing kepala desa diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan program – program dan standar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan kepala desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam bidang pelayanan publik yang bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Namun meskipun kepala desa yang berpendidikan rendah tetapi memiliki nilai tertinggi, sehingga dalam hal ini kepala desa memiliki pengalaman dan program – program yang menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kepala desa merupakan kepala eksekutif desa dan sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja aparatur desa untuk menciptakan suasana yang aman dan terkendali yang di inginkan oleh masyarakat.

Pada indikator melaksanakan kehidupan demokrasi perolehan persentase kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 76,6% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 76,1% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 75,7% yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

Dalam pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses demokrasi yang berada di tingkat pemerintahan desa, pemilihan tersebut dapat berjalan dengan baik jika pemilihan dilakukan secara jujur dan adil, sehingga tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemilihan tersebut dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi di desa tersebut, hal ini tidak lepas dari peran kepala desa yang memberikan kepada masyarakatnya untuk menentukan pilihan nasib desa tersebut. Kepala desa yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu mampu untuk melaksanakan proses demokrasi yang baik, karena dalam pemilihan kepala desa lebih mengutamakan faktor materi yang berguna dalam mendapatkan suara masyarakat desa tersebut, hal ini yang menjadikan pemilihan kepala desa yang seharusnya bertujuan awal untuk mencari seorang pemimpin desa secara demokrasi tetapi disalah gunakan oleh sebagian masyarakat, yaitu dijadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan perjudian.

Kemudian membahas tentang indikator menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang

baik, mendapatkan hasil kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 77,5% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 74,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 79,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

Sehingga administrasi desa yang baik, merupakan sebuah pelayanan publik yang dapat membantu masyarakat dengan maksimal yang berhubungan dengan kemudahan kepengurusan surat – menyurat yang berhubungan dengan administrasi desa. Kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan sumber dayanya sebagai kepala desa, karena jika kepala desa memiliki sumber daya dan pengetahuan yang tinggi dapat mengatasi masalah yang ada di desa dalam bidang administrasi. Dengan SDM kepala desa yang tinggi mampu untuk menciptakan administrasi yang baik. Administrasi yang baik memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk membantu penilaian kinerja kepala desa dan aparatur desa. Sehingga semakin masyarakat memberikan penilaian yang baik maka semakin baik pula kinerja kepala desa dan aparatur desa.

Kemudian pada indikator melaksanakan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, mendapatkan hasil kepala desa yang memiliki pendidikan SMP mendapatkan hasil persentase sebanyak 79,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi. Kepala desa yang berpendidikan SMU mendapatkan hasil persentase sebanyak 71,4% yang termasuk kedalam kriteria tinggi, sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana mendapatkan hasil persentase sebanyak 78,9% yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

Dalam indikator ini kepala desa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersih dari praktek KKN, dalam hal ini kepala desa bisa memberikan contoh kepada bawahannya dan masyarakat untuk tidak melakukan praktek KKN. Karena praktek KKN dapat merugikan masyarakat bahkan Negara. Praktek KKN tidak mementingkan pendidikan yang berperan dalam pencegahan praktek KKN namun moral dan iman kepala desa yang dapat menjauhkan pemerintahan di desa dan masyarakatnya jauh dari praktek KKN.

Penilaian kinerja dapat pula menjadi cara untuk membantu individu untuk mengelola kinerjanya. dan kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi dan untuk menghasilkan kinerja yang baik maka

seorang pimpinan/kepala desa harus memiliki tingkat pendidikan yang sesuai.

Kepala desa sebagai seorang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat yaitu sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban kepala desa, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab dibidang pembangunan, maka kepala desa harus dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa seperti yang ada dalam pemerintahan desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, karena dengan adanya kerja sama antar kepala desa dan aparat beserta BPD, maka program-program pembangunan desa bisa terlaksana dengan baik.

Untuk menjamin terlaksananya program pembangunan desa secara keseluruhan maka faktor kepemimpinan kepala desa sangat berperan penting terhadap upaya-upaya tersebut. Sehingga untuk mendukung kepemimpinannya sudah seharusnya seorang kepala desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai supaya kinerja yang dihasilkan dapat memuaskan bagi masyarakat, dan seorang pemimpin harus mampu menafsirkan segala sesuatu tanpa bantuan staf atau orang lain.

Kepala desa memiliki peran dan juga kedudukan yang penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintah, serta membangun tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai dengan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan aparaturnegara yang berfungsi melayani secara profesionalisme, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melaksanakan maupun mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks penerapan prinsip – prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan

menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparaturnegara semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Tugas pokok dan fungsi aparaturnegara semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparaturnegara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip – prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien, dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan (*fairness*), keseimbangan etika dan kearifan / *good judgment* (Kasim, 2002).

Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, Hughes Owen (1994).

Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong-royong masyarakat. Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal ini perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang Kepala Desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Kepala desa merupakan kepala eksekutif desa dan sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja aparatur (pamong) desa. Peranan yang dimainkan oleh kepala desa ini dalam hal memimpin bawahannya sangat mempengaruhi kinerja pamong desa sehingga kepala desa merupakan pemimpin yang sangat vital di dalam mengatur dan memerintah pamong desa. sehingga antara pamong desa dan kepala desa dapat bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan pendidikan yang di miliki kepala desa dapat menjadikan acuan kepala desa untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja kepala desa, pemerintah pusat perlu mengadakan strategi motivasi karena itu juga merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi instansi. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya PERDA Nomor 5 tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa perlu adanya penataan, motivasi, dan peningkatan kinerja perangkat desa agar kinerjanya dapat ditingkatkan. Menurut Samsudin (2006 : 159) upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kinerja dengan penilaian kerja. Menurut Joko Widodo (2006 : 86) strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah yaitu dengan mengikut sertakan dalam seminar, penataran, dan pelatihan.

Peranan kepala desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya pemerintahan itu berjalan secara baik dan lancar. Sehingga kinerja kepala desa sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa , dalam hal ini pendidikan yang mampu berperan karena sebagai pengoreksi atau pengontrol kinerja kepala desa, karena dengan pendidikan yang tinggi kepala desa dapat memecahkan masalah yang muncul. Sehingga dengan hasil tanggapan responden yang sangat baik mampu untuk memacu kepala desa mengarah kepada pemerintahan yang lebih baik dan maju.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil perolehan keseluruhan responden dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kinerja kepala desa menurut jenjang pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik mendapatkan hasil yang berbeda secara persentase namun memiliki kesamaan dalam kriteria tinggi. Hal ini membuktikan kepala desa di Kecamatan Menganti memiliki pendidikan yang memadai dan

memiliki pengalaman dan wawasan yang berfungsi sebagai peningkatan kinerja kepala desa agar menjadikan tauladan bagi masyarakat dan dapat menjaga kinerjanya untuk mendapatkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat..

Saran

Dengan melihat prospek kedepan, terutama mengenai mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, maka peneliti menyarankan hal - hal sebagai berikut : (1) Disarankan kepada Pemerintah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik agar meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerahnya melalui pendidikan, pelatihan dan memberikan motivasi yang lebih baik lagi di masa depan. (2) Disarankan kepada para kepala desa baik yang berada di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik maupun di luarnya agar meningkatkan prestasi kerjanya melalui upaya peningkatan taraf pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, memperbanyak pelatihan, kursus atau studi banding ke daerah lain untuk menambah keahlian, pengetahuan dan kemampuan kinerja yang tinggi di bidang pemerintahan desa. (3) Kepada para pembaca yang melihat masih banyaknya kelemahan - kelemahan dalam penelitian ini untuk memberikan kritik, sumbang saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Ary Ginanjar Agustian. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spritual Quotient*. Penerbit Arga. Jakarta, 2001.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Menganti dalam Angka 2012*. Gresik, 2012.
- Badan Pusat Statistik. *Gresik Menganti dalam Angka 2012*. Gresik, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta, 2003.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Universitas Negeri Surabaya. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi*. Surabaya: UNESA.

Literatur skripsi :

Mokhammad Nur Huda. 2011. *Persepsi Orang Tua Terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA Negeri I Mojosari – Mojokerto*. Universitas Negeri Surabaya.

Samsudin. 2003. *Skripsi, Faktor yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*, Universitas Airlangga.

Peraturan dan perundang – undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Literatur Internet :

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/KINERJAKEPALAD_ESA diakses pada hari Selasa tanggal 27 November 2012. Jam 20.13 WIB.

<http://www.diskusiskripsi.com/2010/11/peranan-tingkat-pendidikan-terhadap.html>. Diakses pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 Jam 10.30 WIB.

<http://mandalahurip.or.id/lembaga-desa/pemdes/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Jam 18.15 WIB.

<http://www.malukutenggarakab.go.id/index.php/perda/perda-tahun-1992/hak-wewenang-dan-kewajiban-kades-atau-lurah>. Diakses pada hari jum'at tanggal 22 Februari 2013 Jam 14.25 WIB.

